

## MEMPERLUAS WAWASAN DAN MEMPERKUAT ASPIRASI DENGAN LANGKAH STRATEGI DI DPR

Irma Yurita<sup>1</sup>, Veriyansah<sup>2</sup>, Gina Salsabilla<sup>3</sup>, Diki Sanjaya<sup>4</sup>, Erda Sri Rahayu<sup>5</sup>, Jalil Anwar Amanullah<sup>6</sup>

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Email : [irmayurita06@gmail.com](mailto:irmayurita06@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article discusses the important role of the House of Representatives (DPR) in increasing understanding and supporting the desires of the community, especially law students, through strategic steps in the legislative process. The DPR has the task of conveying the aspirations of the people, including the wishes of law students, who have an important role in the development of law and public policy. This article examines how the DPR can function to ensure that the aspirations of the community, including the younger generation, are accommodated in the legislative process. Additionally, with a focus on the use of digital platforms, political education, and collaboration with student organizations, this article examines various ways to encourage young people to actively participate in the political process. This article aims to provide an overview of how important the DPR is in encouraging law students and the younger generation to get involved in political life and policy making in Indonesia.*

**Keywords:** House of Representatives (DPR), Legislative Process, public policy

### ABSTRAK

Artikel ini membahas peran penting Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam meningkatkan pemahaman dan mendukung keinginan masyarakat, khususnya mahasiswa hukum, melalui langkah-langkah strategis dalam proses legislasi. DPR memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat, termasuk keinginan mahasiswa hukum, yang memiliki peran penting dalam pengembangan hukum dan kebijakan publik. Artikel ini mengkaji bagaimana DPR dapat berfungsi untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat, termasuk generasi muda, terakomodasi dalam proses legislasi. Selain itu, dengan fokus pada penggunaan platform digital, pendidikan politik, dan kolaborasi dengan organisasi mahasiswa, artikel ini mengkaji berbagai cara untuk mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa pentingnya DPR untuk mendorong mahasiswa hukum dan generasi muda untuk terlibat dalam kehidupan politik dan pembuatan kebijakan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Proses Legislasi, kebijakan publik

### PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai representasi rakyat yang bertanggung jawab untuk menyampaikan keinginan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa hukum sangat penting sebagai bagian dari generasi muda yang diharapkan dapat memahami perilaku hukum dan politik serta memberikan kontribusi nyata dalam pembuatan kebijakan publik.

Kunjungan kami ke DPR memberikan kesempatan untuk memahami lebih dekat fungsi dan peran lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan. Selama kunjungan, kami diajak menjelajahi berbagai ruangan penting, seperti ruang sidang paripurna yang biasanya hanya kami lihat melalui media. Selain itu, kami juga mengunjungi museum DPR yang menyajikan sejarah panjang perjalanan legislatif di Indonesia. Penjelasan yang disampaikan oleh staf DPR sangat informatif, membantu kami memahami proses kerja

lembaga ini serta bagaimana peran DPR dalam merancang undang-undang. Meski kunjungan ini lebih berfokus pada tur edukatif, pengalaman ini memperkaya wawasan kami tentang sistem legislatif dan menginspirasi kami untuk lebih peduli terhadap dinamika kebijakan publik.

Salah satu cara strategis untuk meningkatkan sinergi antara anggota DPR dan generasi muda adalah berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa hukum. Kolaborasi ini dapat berupa seminar hukum, diskusi panel, atau program magang hukum, yang tidak hanya memberikan pengetahuan praktis kepada mahasiswa tetapi juga memperkuat pemahaman mereka tentang bagaimana DPR membuat kebijakan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hubungan yang harmonis antara mahasiswa hukum dan DPR dapat menghasilkan politik yang ramah dan progresif.

Mahasiswa hukum sekarang dapat lebih mudah berkontribusi pada proses pembentukan kebijakan publik melalui konsultasi publik, petisi online, atau diskusi. Selain itu, hal ini memberi mereka kesempatan untuk menerapkan pengetahuan akademis mereka dalam situasi dunia nyata. Misalnya, mereka dapat menganalisis kebijakan yang sedang dibahas, mengkritik peraturan yang dianggap tidak relevan, atau menawarkan solusi hukum yang lebih progresif. Selain itu, karena masyarakat, termasuk mahasiswa hukum, dapat melihat proses legislatif secara langsung, teknologi ini dapat membantu DPR menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dengan demikian, kerja sama antara mahasiswa hukum sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan DPR sebagai lembaga legislatif dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih adil, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pentingnya peran DPR dalam mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam proses politik sejalan dengan kebutuhan untuk memilih pemimpin masa depan yang

memiliki pemahaman mendalam tentang proses legislasi dan manajemen pemerintahan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana DPR dapat berfungsi sebagai katalis untuk mendorong generasi muda dan mahasiswa hukum untuk lebih terlibat dalam politik dan pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Fokus utama diskusi ini adalah tindakan strategis seperti pendidikan politik, kerja sama dengan organisasi mahasiswa, dan meningkatkan platform digital.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi literatur untuk mengkaji berbagai regulasi, teori hukum, dan kebijakan publik yang relevan dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mendorong partisipasi generasi muda, khususnya mahasiswa hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer seperti undang-undang, serta artikel jurnal hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji landasan hukum yang mengatur peran DPR dalam proses legislasi dan partisipasi publik. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis teori-teori yang relevan dengan upaya meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam proses politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Peran DPR Dalam Memperkuat Aspirasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai perwakilan rakyat dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik. Salah satu tugas utama DPR adalah mengakomodasi aspirasi masyarakat, termasuk generasi muda, yang memiliki peran strategis dalam pembuatan kebijakan publik.

Peran yang dijalankan oleh anggota legislator tak bisa dilepaskan dari kewajiban melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat, warga di daerah pemilihan, dan warga negara Indonesia secara umum. (Agus Salman and Efriza 2022) Proses penyerapan aspirasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kebijakan publik yang relevan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, anggota DPR harus mampu mendengar, memahami, dan mengartikulasikan berbagai masukan yang datang dari masyarakat ke dalam bentuk kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif.

Karena Indonesia adalah negara demokrasi, dan kebebasan berpendapat merupakan hak masyarakat, adalah penting untuk menyuarakan keinginan untuk kesejahteraan bersama (Hafizd et al. 2023). Hak ini telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat Indonesia memiliki ruang untuk terlibat aktif dalam menyampaikan aspirasi, khususnya dalam memengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Selanjutnya, Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 memberikan landasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat dalam sistem pemerintahan. Fungsi representasi ini mencakup tugas mendengar, menyerap, dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan melalui produk legislasi yang berpihak pada kepentingan publik. Dalam praktiknya, anggota DPR wajib melibatkan masyarakat, baik secara

langsung melalui kunjungan kerja ke daerah pemilihan, maupun secara tidak langsung melalui platform digital atau forum konsultasi publik.

Adanya lembaga perwakilan adalah hak mutlak setiap negara demokrasi yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini penting karena lembaga ini berfungsi untuk mewakili kepentingan rakyat. (Utama and Roza 2022) Dalam konteks ini, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi penghubung antara suara rakyat, termasuk mahasiswa hukum, dengan proses legislasi. Peran ini tidak hanya sebatas menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa hukum sebagai agen perubahan, DPR dapat memperkuat proses legislasi melalui pembahasan yang lebih inklusif dan substansial, sehingga menghasilkan undang-undang yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Salah satu karakteristik negara demokrasi adalah proses legislasi yang transparan dan partisipatif. DPR, sebagai lembaga legislatif, bertugas memastikan adanya keterlibatan masyarakat, termasuk mahasiswa, terlibat dalam proses seperti konsultasi, diskusi publik, dan penyusunan rancangan undang-undang. (PERDANI 2019) Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil legislasi, tetapi juga memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mahasiswa hukum dengan wawasan dan pemahaman akademis yang dimiliki, berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Mereka dapat memberikan masukan konstruktif, melakukan analisis kritis terhadap rancangan undang-undang, serta

mengadvokasi kepentingan publik secara lebih terarah. Dengan keterlibatan yang sinergis antara DPR dan elemen masyarakat, proses legislasi dapat menjadi lebih inklusif, memperkuat legitimasi hukum, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta demokrasi.

Mahasiswa hukum berperan sebagai pengkritik kebijakan dan mediator antara masyarakat dan pembuat undang-undang. Mahasiswa dapat membantu menemukan kekurangan dalam rancangan undang-undang melalui forum diskusi, demonstrasi damai, atau bekerja sama dengan lembaga penelitian DPR. (Putra 2018) Dengan partisipasi aktif mahasiswa hukum dalam proses legislasi, diharapkan produk undang-undang yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.



**Gambar 1. Papan fungsi DPR.**

(Sumber: Dokumentasi kunjungan Di DPR)

Gambar ini menampilkan papan informasi dengan desain modern yang menjelaskan tiga fungsi utama DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Papan-papan ini disusun rapi di atas latar dinding putih, dilengkapi lampu sorot yang menambah kesan profesional. Fungsi legislasi menjadi sorotan utama pada papan pertama,

dijelaskan secara singkat bahwa DPR bertugas membahas rancangan undang-undang (RUU) dan menetapkannya menjadi peraturan perundang-undangan. Papan berikutnya melanjutkan peran anggaran dan pengawasan sebagai bagian integral dari upaya DPR dalam menjalankan tugasnya.

Gambar ini mengilustrasikan komitmen DPR dalam memperkuat aspirasi masyarakat melalui proses legislasi yang transparan dan strategis, memberikan edukasi kepada publik tentang peran penting institusi ini. Sebuah simbol visual dari langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.



**Gambar 2. Ruang Rapat Paripurna**

(Sumber: Dokumentasi kunjungan Di DPR)

Gambar ini menampilkan bagian depan sebuah ruang rapat yang dinamai Ruang Rapat Paripurna. Nama tersebut ditampilkan dengan huruf berwarna emas yang kontras indah dengan latar dinding marmer berwarna gelap. Kombinasi material ini menciptakan kesan megah sekaligus profesional, mencerminkan pentingnya fungsi ruangan ini dalam sebuah institusi.

Ruang Rapat Paripurna adalah salah satu simbol penting dari fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses legislasi. Dalam ruang ini, gagasan besar dibahas, keputusan penting diambil, dan aspirasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk kebijakan strategis. Sebagai tempat yang menjadi jantung kegiatan parlemen, Ruang Rapat Paripurna tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga menjadi arena untuk memperkuat representasi rakyat.

Dengan desain interior yang megah dan fungsional, ruangan ini dirancang untuk mendukung diskusi yang produktif dan strategis. Dinding marmer yang kokoh merepresentasikan kestabilan dalam proses legislasi, sementara elemen kayu memberikan kesan humanis, mengingatkan bahwa kebijakan yang dibahas selalu berakar pada kebutuhan masyarakat. Ruangan ini menjadi simbol keterpaduan antara kekuatan institusi dan nilai-nilai humanistik.



**Gambar 3. Surat Suara Pemilu 1955**  
(Sumber: Dokumentasi kunjungan Di DPR)

Gambar ini menampilkan dokumen bersejarah berupa surat suara Pemilu tahun 1955, yang merupakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwujudan demokrasi yang baru tumbuh pasca kemerdekaan. Surat suara tersebut mencerminkan semangat partisipasi masyarakat dalam memilih wakil mereka melalui berbagai partai politik yang bertanding saat itu.

Pada surat suara ini, terlihat beragam lambang partai politik yang menjadi representasi berbagai ideologi dan kelompok masyarakat, mulai dari nasionalis, keagamaan, hingga partai-partai yang membawa aspirasi regional. Keberagaman ini menunjukkan betapa kayanya spektrum politik Indonesia di masa itu, dengan lebih dari 30 partai politik yang terdaftar. Pemilu 1955 menjadi tonggak penting yang memperkenalkan konsep suara rakyat dalam sistem perwakilan formal di Indonesia.

Pemilu 1955 tidak hanya menjadi ajang pemilihan wakil rakyat, tetapi juga simbol persatuan dalam keberagaman. Di tengah dinamika politik pasca-kemerdekaan, pemilu ini menunjukkan keseriusan bangsa Indonesia dalam membangun sistem demokrasi yang kokoh. Proses ini menciptakan ruang untuk menyerap dan memperkuat aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih secara langsung.

Dalam konteks ini, DPR memainkan peran penting sebagai institusi yang menampung aspirasi rakyat dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan strategis. Pemilu 1955 menandai awal dari proses legislasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terus diperjuangkan hingga kini.

Pemilu pertama ini memberikan banyak pelajaran berharga yang masih relevan untuk sistem demokrasi Indonesia saat ini. Proses legislasi yang inklusif, keterlibatan aktif masyarakat, dan keberagaman aspirasi adalah elemen penting yang diwariskan dari sejarah ini. Dalam menghadapi tantangan modern, DPR diharapkan terus memperkuat perannya sebagai wadah representasi rakyat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang dirintis sejak Pemilu 1955.

#### **b. Peran DPR Dalam Mendorong Partisipasi Aktif Generasi Muda Dalam Proses Politik**

DPR memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam proses politik dan legislasi di Indonesia. Partisipasi generasi muda sangat penting untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan politik yang relevan, seperti seminar, diskusi panel, dan program magang, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman generasi muda tentang proses legislasi tetapi juga membangun kesadaran politik mereka. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi sarana efektif untuk menjangkau lebih banyak partisipasi generasi muda melalui konsultasi publik daring, petisi online, dan diskusi interaktif dengan anggota DPR. Transparansi dalam proses legislasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan generasi muda terhadap institusi ini, di mana mereka dapat melihat dan berkontribusi secara langsung dalam pembahasan kebijakan. Dengan keterlibatan yang aktif, generasi muda tidak hanya menjadi pengamat tetapi juga mitra strategis dalam pengambilan keputusan, yang pada

akhirnya dapat memperkuat representasi rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kesadaran politik anak muda terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini memberi mereka pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, tentang sistem politik dan proses demokrasi, dan tentang pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. (Mauladi and Makmun 2024) Pendidikan ini tidak hanya membekali mereka dengan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat. Dalam era digital, anak muda sering terpapar informasi yang bias atau tidak akurat tentang DPR, sehingga penting bagi pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kemampuan berpikir kritis agar mereka dapat mengevaluasi kinerja wakil rakyat secara objektif. Selain itu, pendidikan ini harus mendorong partisipasi aktif anak muda dalam proses politik, baik melalui pemilu maupun pengawasan terhadap kebijakan DPR, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga penggerak perubahan yang mampu menuntut akuntabilitas dan transparansi dari para legislator.

Kesadaran politik adalah pemahaman yang penting mengenai kondisi politik yang berdampak pada kepentingan, perhatian masyarakat, serta hak dan kewajiban sebagai bagian dari sebuah negara. (Diea Amiliya 2024; Firmanto and Abadi 2023) Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran ini, terutama di kalangan anak muda. Melalui pendidikan yang baik, mereka tidak hanya memahami

hak-hak demokratisnya, tetapi juga mengenal peran institusi politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan arah kebijakan negara.

Pendidikan pemilih adalah sebuah langkah strategis untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Akan tetapi penyelenggara pemilu dari setiap periode pemilu demokratis hingga saat ini masih belum melakukan pendidikan pemilih yang programatik dan masih menggunakan pendekatan informasi pemilih yang merupakan solusi sementara. Partai politik juga masih belum maksimal dalam menjalankan fungsi pendidikan politik sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. (Diah Setiawaty 2014) Namun, hingga saat ini, penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih menggunakan pendekatan informasi pemilih yang bersifat sementara, alih-alih pendidikan pemilih yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, peran partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik juga belum maksimal, padahal hal tersebut merupakan mandat dari undang-undang.

Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran penting dalam mendorong partisipasi aktif pemilih muda. Sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk mewakili suara rakyat, DPR perlu memastikan bahwa pendidikan politik bagi generasi muda tidak hanya menjadi agenda pemilu, tetapi juga bagian dari kebijakan jangka panjang yang sistematis. DPR dapat mendorong pembentukan kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini bertujuan untuk menciptakan pemilih yang tidak hanya memiliki hak

pilih, tetapi juga memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi.

Selain itu, DPR juga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa partai politik melaksanakan fungsi pendidikan politiknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik harus melampaui sebatas perekrutan massa, tetapi harus berfokus pada pengembangan kader yang berkualitas, terutama di kalangan pemilih muda. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk dana yang dialokasikan untuk pendidikan politik, DPR dapat mendorong partai politik untuk mengimplementasikan program pendidikan politik yang terencana dan berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional.



**Gambar 4. DPR RIS Bersejarah**  
(Sumber: Dokumentasi kunjungan Di DPR)

Gambar tersebut menggambarkan sejarah pembentukan DPR RIS sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. DPR RIS berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mencerminkan keberagaman bangsa, dengan anggota yang berasal dari berbagai kelompok etnis dan wilayah. Foto-foto yang ditampilkan menunjukkan suasana sidang dan interaksi antaranggota yang menjadi bagian dari upaya konsolidasi politik pasca kemerdekaan. Semangat persatuan juga terlihat dari ilustrasi demonstrasi dengan slogan "Satu Bahasa Indonesia, Satu Bangsa Indonesia, Satu Tanah Air Indonesia." Relevansi historis ini dapat menjadi inspirasi bagi DPR masa kini dalam mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. DPR dapat memainkan peran strategis dengan menginisiasi program pendidikan politik, membuka ruang diskusi kebijakan yang inklusif, dan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau anak muda. Hal ini penting agar generasi muda dapat memahami peran DPR sekaligus terlibat dalam pembangunan demokrasi yang lebih kuat.



**Gambar 5. Kunjungan Edukasi DPR**  
(Sumber: Dokumentasi kunjungan Di DPR)

Foto tersebut menunjukkan kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang sedang

berfoto bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Bapak M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H., di depan patung Soekarno yang berada di area Gedung Nusantara, kompleks DPR RI, Jakarta. Gedung ikonik dengan kubah hijau di latar belakang menjadi simbol aktivitas legislatif Indonesia. Kunjungan ini menjadi bagian dari program pendidikan atau praktik lapangan untuk memperkenalkan kami pada fungsi dan peran DPR.

Kegiatan seperti ini sangat relevan dalam mendukung peran DPR dalam mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam proses politik. Dengan mengadakan kunjungan edukatif, generasi muda dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana DPR bekerja, fungsi legislatif, serta pengambilan keputusan politik yang berdampak langsung pada masyarakat. Langkah ini juga memperkuat kesadaran mahasiswa akan pentingnya keterlibatan mereka dalam demokrasi, baik sebagai pemilih kritis maupun calon pemimpin di masa depan. Partisipasi aktif ini menciptakan generasi muda yang melek politik dan siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

## SIMPULAN

Artikel ini mengkaji peran strategis DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa hukum, untuk mendukung proses legislasi yang lebih inklusif dan partisipatif. pendidikan politik, dan pemanfaatan teknologi digital, DPR dapat mendorong generasi muda untuk aktif berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik. Dengan melibatkan mahasiswa hukum sebagai agen perubahan (*agent of change*), diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Artikel ini menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan generasi muda untuk memperkuat

demokrasi serta mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Di Sumatera Barat.” *UNES Journal of Swara Justisia* 6 (3): 318. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.277>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salman, and Efriza. 2022. “Peran Anggota Dpd Ri Provinsi Dki Jakarta Periode 2014-2019 Dalam Menyerap Aspirasi Warga Dki Jakarta.” *Jurnal Adhikari* 1 (3): 118–30. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.38>.
- Diah Setiawaty. 2014. “MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK YANG PROGRAMATIK.” *JURNAL ISLAMIC REVIEW*, 117–46.
- Diea Amiliya, Siti Tiara Maulia. 2024. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA” 4 (0): 1–23.
- Firmanto, Fakhry, and Wilken Rezki Abadi. 2023. “Peran Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pemilihan Presiden 2024.” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (1): 21–25.
- Hafizd, Jefik, Fika Siti Nurfalalah, Mohamad Arya Pradana Ramadhan, Pipin Kaerudin, and Kharisma Elok. 2023. “Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Untuk Perubahan Yang Lebih Baik.” *Strata Social and Humanities Studies* 1 (2): 147–55. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>.
- Mauladi, R, and S Makmun. 2024. “Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kesadaran Politik Generasi Muda.” *Causa: Jurnal Hukum Dan ...* 5 (3). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/4157%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/4157/3876>.
- PERDANI, RIZKI WULAN. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi*.
- Putra, Dwiky Ramanda. 2018. “Analisis Peranan Badan Legislasi Dalam Penyusunan Prolegnas.” *Res Publica* 2 (1): 28–42.
- Utama, Daswar, and Darmini Roza. 2022. “Peran Dewan Perwakilan Daerah (Dpd)